



Hairul Amren S¹
Riadi Parasian Sirait²
David C Ginting³
David F Siagian⁴
Meisa Siregar⁵

KEDUDUKAN PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peranan sentral dalam pembentukan karakter, identitas, dan sistem hukum di tanah air. Terdiri dari lima sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks hukum, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, mengarahkan penyusunan undang-undang yang menjunjung tinggi keadilan, hak asasi manusia, dan persatuan. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia, pengaruhnya terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, serta tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi. Selain itu, penekanan pada upaya penguatan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda menjadi fokus utama, di mana pendidikan Pancasila, kegiatan bela negara, dan keterlibatan politik diharapkan dapat membangkitkan semangat cinta tanah air. Dengan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila dan aplikasinya, diharapkan nilai-nilai yang terkandung dalamnya dapat tetap relevan, memberikan inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga keutuhan dan identitas bangsa, serta menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera di tengah dinamika global.

Kata Kunci: Dasar Hukum, Globalisasi, Pancasila.

Abstract

Pancasila as the foundation of the Indonesian state has a central role in the formation of character, identity, and the legal system in the country. Consisting of five principles that reflect noble values, Pancasila functions as a guideline in national and state life. In the context of law, Pancasila is the source of all sources of law, directing the preparation of laws that uphold justice, human rights, and unity. This study explores the application of Pancasila values in the legal system in Indonesia, its influence on the formation of laws and regulations, and the challenges faced in the era of globalization. In addition, the emphasis on efforts to strengthen the sense of nationalism among the younger generation is the main focus, where Pancasila education, national defense activities, and political involvement are expected to arouse the spirit of love for the country. With a deep understanding of Pancasila and its applications, it is hoped that the values contained therein can remain relevant, providing inspiration for the Indonesian people to maintain the integrity and identity of the nation, and create a just and prosperous society amidst global dynamics.

Keywords: Legal Basis, Globalization, Pancasila.

PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, bukan hanya sekadar rumusan nilai, tetapi juga merupakan panduan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sila yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan cita-cita dan nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat membentuk karakter dan identitas bangsa (Siregar et al., 2022). Dalam konteks hukum dan perundang-undangan, Pancasila menjadi sumber utama yang mengarahkan penyusunan dan penerapan hukum di Indonesia. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan yang terkandung dalam

^{1,2,3,4,5} Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara, Politeknik Penerbangan Medan
email: hairulamren123@gmail.com, riadisirait181003@gmail.com, gintingdavid08@gmail.com,
davidsiagian4444@gmail.com, meisasiregar679@gmail.com

Pancasila berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan merata bagi seluruh warga negara (Ardhani et al., 2022).

Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila mengandung nilai-nilai yang fundamental dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua, misalnya, menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat setiap individu, serta persamaan hak di hadapan hukum tanpa diskriminasi (Pratama et al., 2022). Dalam konteks ini, hukum harus mencerminkan keadilan yang menyeluruh, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan menjaga keseimbangan sosial (Rizal et al., 2022).

Di tengah tantangan globalisasi yang kian pesat, Pancasila menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengikis nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Perkembangan teknologi, arus informasi, dan pengaruh budaya asing dapat membawa dampak positif, namun juga berpotensi merusak jati diri bangsa. Generasi muda, sebagai agen perubahan, dituntut untuk mampu menyikapi perkembangan ini dengan bijaksana, memilah hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air (Dewi, 2021).

Pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, politik, dan budaya, menjadi salah satu fokus dalam menjaga identitas bangsa. Pendidikan Pancasila diharapkan tidak hanya sekadar mengajarkan teori, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari masyarakat (Handayani et al., 2021). Kegiatan bela negara, festival kebudayaan, dan keterlibatan dalam politik diharapkan dapat membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda, sehingga mereka mampu berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa (Hamja, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia, dampaknya terhadap pembentukan undang-undang, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat rasa nasionalisme di tengah arus globalisasi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang Pancasila dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terus relevan dan menginspirasi masyarakat Indonesia untuk menjaga keutuhan dan identitas bangsa, serta menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah diskusi kelompok dan tanya jawab. Metode ini dipilih karena memiliki beberapa keunggulan yang dapat mendukung penggalian data dan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks hukum dan masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan Pancasila dalam konteks hukum dan sosial, serta kontribusi generasi muda dalam mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interpretasi Pancasila dalam Konteks Globalisasi dalam Kehidupan Saat Ini

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki lima sila yang masing-masing mengandung nilai-nilai penting bagi kehidupan masyarakat. Sila pertama menegaskan hak setiap individu untuk memeluk agama dan kepercayaan yang dianut, serta kewajiban untuk menghargai dan menghormati keyakinan orang lain. Sila kedua menekankan kesetaraan dan perlakuan adil bagi semua warga negara, tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Sila ketiga berfokus pada pentingnya menjaga keutuhan negara dan ideologi Pancasila, mengingat peristiwa sejarah seperti G30S/PKI yang menunjukkan ancaman terhadap identitas bangsa. Di era globalisasi 5.0, upaya mempertahankan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin krusial, meskipun kemajuan zaman terus berlangsung. Sila keempat memberikan hak kepada setiap warga negara untuk berdemokrasi, memilih, dan diwakili, serta mengungkapkan pendapat. Terakhir, sila kelima menuntut sikap anti-korupsi dari semua elemen masyarakat, baik pejabat maupun rakyat sipil, karena korupsi menghambat kemakmuran negara. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai panduan untuk menjunjung tinggi nilai kebangsaan, keberagaman, demokrasi, dan keadilan sosial, serta menjaga identitas bangsa tanpa mengikis esensi Pancasila itu sendiri.

Pengaruh Nilai-Nilai Kemanusiaan yang Terkandung Dalam Sila Kedua Pancasila dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia

Pada sila kedua mengandung unsur pentingnya menghormati martabat manusia dan keadilan yang didasari dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada amandemen kedua Bab 10A tentang HAM. Dalam konteks ini, hukum berfungsi untuk melindungi setiap hak individu, termasuk hak hidup dan kebebasan berpendapat. Hal ini mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk menjamin hak asasi manusia sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat setiap individu.

Yang kedua, yaitu prinsip persamaan di depan hukum, pada sila kedua mengajarkan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum, bersikap adil tanpa memandang ras, agama, budaya, dan status sosial. Ini berarti bahwa semua individu, tanpa kecuali, memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan, sehingga tidak ada diskriminasi dalam proses hukum.

Hukum berhubungan dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan peran dari sila kedua adalah sebagai generasi muda agar berperan lebih aktif dan mengimplementasikan isi dari nilai Pancasila. Dalam hal ini, generasi muda diharapkan untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai keadilan dan persamaan hak, serta berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Dengan demikian, sila kedua tidak hanya menjadi prinsip dasar dalam hukum, tetapi juga menjadi pedoman bagi generasi penerus untuk menjalankan tanggung jawab mereka dalam menciptakan keadilan sosial di Indonesia.

Peran Anak Bangsa Menyikapi Globalisasi Sebagai Ancaman Pancasila

Sebagai generasi muda dapat lebih menyikapi dan memilah hal hal yang baik maupun yang buruk, sehingga kita dapat menggunakan maupun mengimplementasikan perkembangan globalisasi dalam hal positif sehingga tidak menyinggung nilai nilai dari Pancasila, dan sebagai anak bangsa harus memiliki rasa ingin maju dengan mengurasi rasa pasif yang dimaksud rasa tidak peduli dengan apa yang terjadi saat ini. Contohnya pada saat ada musyawarah, mufakat maupun pada saat pemilu harus bersikap adil. Di era globalisasi kita harus lebih aktif mencari informasi dan wawasan dalam menggunakan globalisasi bidang teknologi. Hal negative pada perkembangan globalisasi dapat di liat di sila pertama dimana banyak budaya yang tidak memiliki agama, tetapi Indonesia kita berhak dan diwajibkan memiliki kepercayaan dalam beragama.

Pada sila kedua, dimana banyak budaya budaya asing yang masuk ke Indonesia, yang dimana di negara mereka budaya tersebut biasa saja tapi di Indonesia kurang, sebagai contoh dalam berpakaian orang Barat yang bisa saja membuat generasi muda terpengaruh dengan canggih nya teknologi seperti media sosial, maka anak bangsa harus lebih selectif lagi dalam menyikapinya untuk mempertahankan Pancasila. Contoh yang kedua yaitu pada attitude atau adab anak anak jaman sekarang, dimana wilayah bagian timur attitude, adab masih sangat dijunjung tinggi dan Indonesia terkenal dengan sopan santun yang ramah, tetapi semakin maju era globalisasi melunturkan attitude pada anak bangsa. Istilah asimilasi yaitu percampuran budaya tetapi menghilangkan budaya aslinya yang seharusnya tidak terjadi pada kaum muda dan adanya istilah akulturasi dimana ada budaya asing yang masuk tetapi yang diserap hal positif tetapi tidak meninggalkan budaya asli Indonesia. Pada sila ketiga, keutuhan negara kita dimana sifat asli Indonesia semakin berkurang terhadap perubahan globalisasi pada anak muda di Indonesia.

Pentingnya Peraturan Perundang Undangan di Indonesia untuk Tidak Bertentangan Dengan Nilai Pancasila

Pancasila adalah sumber dari segala hukum dan sebagai dasar negara. Pernyataan ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi, tetapi juga sebagai fondasi yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pembukaan UUD 1945 tercantum isi dari Pancasila, yang menunjukkan bahwa Pancasila diakui sebagai bagian integral dari konstitusi dan menjadi landasan bagi penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selain UUD 1945, TAP MPR No 20 MPRS tahun 1966 menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Keputusan ini memperkuat kedudukan Pancasila sebagai pedoman dalam penyusunan hukum dan kebijakan publik, memastikan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam

Pancasila. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai norma dasar yang mengarahkan pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia, menjamin bahwa semua kebijakan dan tindakan pemerintah tetap selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, persatuan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Tidak Sesuai Dengan Nilai Pancasila

Dapat dilihat dari sila pertama yaitu menghormati kebebasan beragama jika seseorang mengalami pembatasan dalam mengekspresikan keyakinannya maka bertentangan dengan nilai sila pertama; dalam sila kedua dapat melanggar kemanusiaan apabila penerapan membatasi akses publik terhadap pengetahuan maupun budaya seperti penggunaan hak cipta dalam akses buku Pendidikan maupun karya ilmiah lainnya; selanjutnya pada sila ketiga menciptakan ketidaksetaraan antara berbagai kelompok Masyarakat atau wilayah dapat memicu keadilan sosial yang dapat mengganggu persatuan; sila ke empat yaitu apabila proses pembuatan undang-undang tidak melibatkan pihak terkait melalui musyawarah yang adil maka akan melanggar prinsip musyawarah dan mufakat di Indonesia; yang terakhir sila kelima apabila mengutamakan pihak-pihak tertentu dan mengabaikan hak cipta dari kalangan kecil maupun individu, hal ini mencederai keadilan sosial perlindungan hak cipta yang dapat diakses secara merata. Dalam proses pembuatan UU tersebut bermasalah karena ditetapkan pada jam 2 pagi yang merugikan Masyarakat.

Prinsip Keadilan Sosial dalam Pancasila Diterapkan Dalam Pengujian Konstitusional UU yang Mengatur Sektor Ekonomi Terutama dengan Investasi Asing

Selain keadilan sebagai prinsip perekonomian, dimana ada jual beli tetapi tetap mempertimbangkan apa yang didapat untuk negara Indonesia. Ada beberapa prinsip yang diterapkan dalam pengujian konstitusional ini yaitu: Pancasila dapat mengutamakan rakyat dan keadilan ekonomi; distribusi manfaat ekonomi yang adil; perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat rentan dimana begitu banyak investasi asing tetapi tetap mempertimbangkan dan mempertahankan mata pencaharian local; keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial; kepastian hukum dan proses demokratis yang melibatkan sektor ekonomi yang strategis yang mengutamakan akuntabilitas dan transparansi. Maka prinsip keadilan sosial menjadi alat pengujian untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan Masyarakat Indonesia terutama dalam investasi asing dan SDA.

Contoh: PT Freeport, sebelum tahun 2018 saham yang diberi diatur dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang minerba kurang lebih sekitar 9%, dan pada tahun 2018 adanya renegotiasi antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport diberikan saham dengan peningkatan tinggi kurang lebih 53,%, dan keuntungan lainnya seperti emas 4%, batu bara 3,57% yang diatur dalam UU No. 3 tahun 2020 dan semuanya tertulis dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2, dan pada dasarnya investasi asing belum ada yang digunakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Hubungan Antara Pancasila dan Prinsip HAM dalam Sistem Hukum di Indonesia

Dalam dasar filosofi yang mencakup nilai-nilai prinsip HAM seperti pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam kebebasan beragama. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara menempatkan hak-hak individu sebagai hal yang fundamental, termasuk hak untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing.

Yang kedua, pengakuan dasar UUD 1945 yaitu Pancasila tercermin dalam UUD 1945 pada bait keempat yang mengatur perlindungan HAM pada pasal 28A hingga 28J. Pasal-pasal ini secara eksplisit menjamin berbagai hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpikir, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menjunjung tinggi martabat manusia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam undang-undang tentang HAM seperti UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang ini berfungsi sebagai peraturan konkret yang merinci dan mengatur perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila. Dan yang terakhir, Pendidikan HAM di mana Pancasila menjadi dasar dalam pendidikan dalam nilai-nilai HAM, berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penghormatan akan hak asasi individu. Melalui pendidikan, masyarakat diharapkan dapat memahami dan menghargai hak asasi manusia sebagai bagian

integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila Termasuk Sebagai Sumber Hukum Formil dan Hukum Material

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, baik formil maupun material. Pernyataan ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan ideologi, tetapi juga sebagai pedoman yang mendasari setiap proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Dengan kata lain, setiap undang-undang yang disusun harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga mencerminkan karakter dan jati diri bangsa.

Pancasila merupakan acuan dari segala pembuatan undang-undang. Ini berarti bahwa dalam setiap tahap legislasi, mulai dari perumusan hingga pengesahan, Pancasila harus menjadi rujukan utama untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Hukum formil adalah hukum yang bersifat operasional dan berhubungan langsung dengan penerapan hukum. Ini mencakup aturan-aturan prosedural yang menentukan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, termasuk proses peradilan dan pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga negara. Sedangkan hukum material adalah sumber yang berasal dari substansi hukum. Ini mencakup norma-norma yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta nilai-nilai yang mendasari aturan hukum tersebut. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber hukum mencakup kedua aspek ini, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengaturan hukum di Indonesia, baik dalam praktiknya maupun dalam substansi yang mendasarinya.

Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Memperkuat Rasa Nasionalisme Melalui Pancasila

Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat rasa nasionalisme melalui Pancasila meliputi berbagai inisiatif yang berfokus pada pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu langkah penting adalah Pendidikan Pancasila yang memperkenalkan arti dari Pancasila. Melalui kurikulum yang tepat, generasi muda dapat memahami esensi dan makna dari setiap sila Pancasila, sehingga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Kegiatan bela negara juga menjadi salah satu upaya yang signifikan. Melalui pelatihan dan pembelajaran tentang cinta tanah air serta tanggung jawab sebagai warga negara, masyarakat, khususnya generasi muda, akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya mempertahankan kedaulatan dan integritas bangsa.

Kegiatan kebudayaan seperti festival seni berperan dalam merayakan keberagaman budaya Indonesia. Dengan mengadakan festival yang menampilkan seni dan budaya dari berbagai daerah, masyarakat dapat lebih menghargai warisan budaya lokal sekaligus memperkuat rasa kebangsaan. Penguatan identitas nasional yang mengedukasi masyarakat tentang sejarah dan cinta tanah air juga sangat penting. Melalui program-program yang mengajarkan tentang perjuangan bangsa, generasi muda dapat memahami betapa berharganya kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan.

Selain itu, mencegah ancaman globalisasi dalam bentuk akulturasi menjadi tantangan yang harus dihadapi. Dalam menghadapi masuknya budaya asing, masyarakat perlu memiliki filter yang baik agar tidak kehilangan jati diri dan nilai-nilai budaya asli Indonesia. Keterlibatan dalam politik, misalnya melalui organisasi di kampus, juga merupakan langkah yang tepat untuk menumbuhkan partisipasi aktif generasi muda dalam proses demokrasi. Dengan berpartisipasi dalam organisasi, mereka dapat belajar tentang tata kelola negara, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya peran aktif dalam masyarakat.

Anak zaman sekarang sudah awam dengan Pancasila, tetapi sejarah perjuangan bangsa adanya perumusan Pancasila menunjukkan betapa pentingnya pemahaman ini. Mempertahankan negara dan kemerdekaan Indonesia memiliki dasar negara yang mempersatukan suku, agama, ras, dan budaya. Melalui pemahaman ini, diharapkan masyarakat dapat menghargai perbedaan pendapat dan pandangan, yang tetap menjunjung persatuan.

SIMPULAN

Pancasila berperan sebagai ideologi dan sumber hukum utama dalam pembentukan hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Lima sila Pancasila memberikan nilai dan prinsip yang mendasari setiap hukum, memastikan bahwa setiap peraturan selaras dengan nilai-nilai keadilan dan persatuan. Keterpaduan antara hukum positif dan budaya masyarakat sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Selain itu, penegakan hukum harus berlandaskan pada Pancasila, memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip

kemanusiaan dan demokrasi. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman dalam menciptakan sistem hukum yang legitimate dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, M. Della, Utaminingsih, I., Ardana, I., & Fitriono, R. A. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(2).
- Dewi, D. A. (2021). Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1).
- Hamja, B. (2020). Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Bangsa.
- Handayani, P. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Membangun Kesadaran Sikap Bela Negara Pada Generasi Milenial Dan Siswa Sekolah Dasar Dalam Sistem Pertahanan Negara. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 4874–4880. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1578>
- Siregar, S. K., Rudiyanto, Yulianto, B. A., Widodo, P., & Saragih, H. J. R. (2022). Pelaksanaan Bela Negara Sebagai Pembentukan Karakter Bangsa Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Pratama, D. A., Ginanjar, D., & Solehah, L. S. (2022). Penerapan Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari - Hari Sebagai Pendidikan Karakter Di Mts. Darul Ahkam Sukabumi. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(2).
- Rizal, M., Budiman, F., Salsabilla, A. R., Gunawan, M. A., & Nugraha, R. G. (2022). Penerapan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).